

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2017-2022

V. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH  
V. A. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

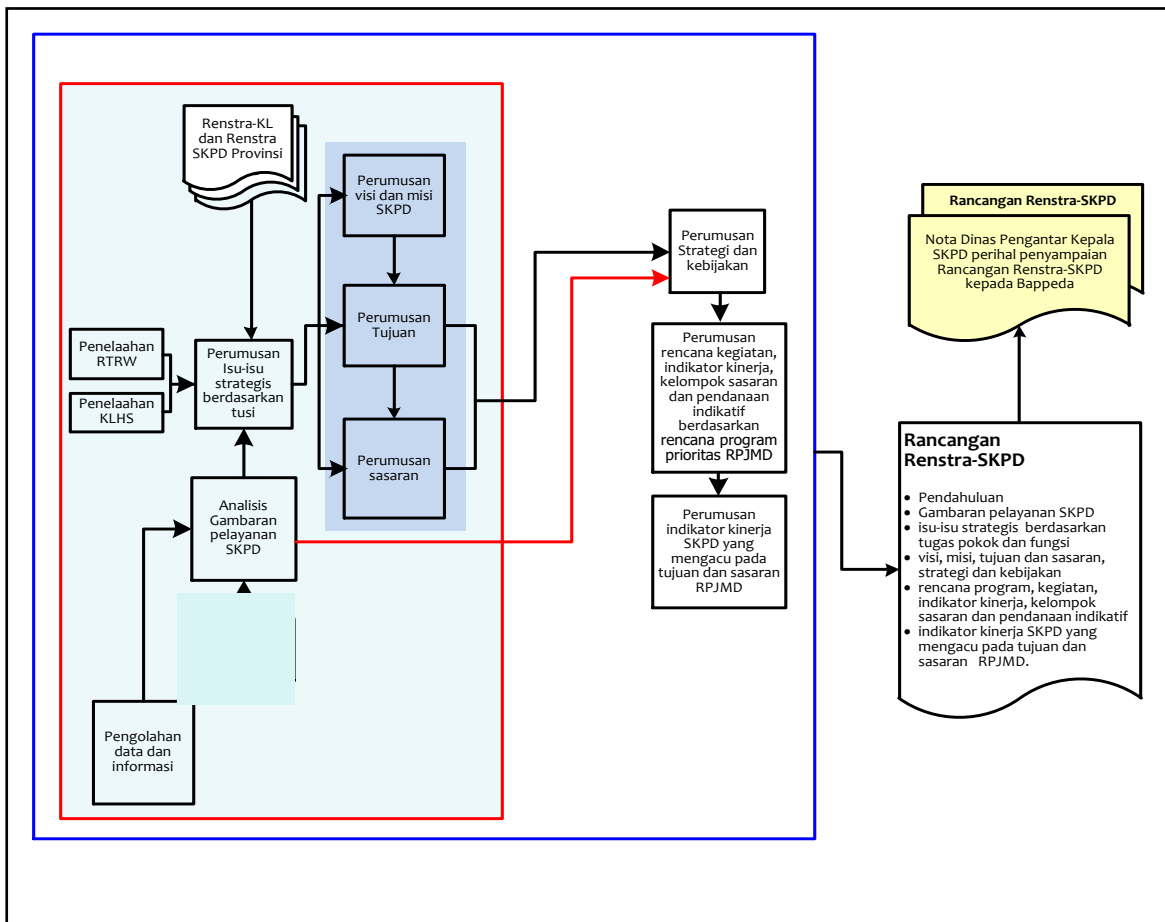
Penyusunan Renstra Baperlitbang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2015-2019, Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2015-2019, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

Proses penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Baperlitbang Tahun 2017 - 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Baperlitbang dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara memiliki kedudukan yang sangat strategis. Renstra Tahun 2017-2022 menjadi acuan bagi Baperlitbang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Renstra juga menjadi acuan dalam penetapan kinerja dan pelaporan kinerja dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan

dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan usaha sistematis dari berbagai pelaku baik umum atau pemerintah daerah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan cara menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah, dan melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder sehingga dapat berhasil guna dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Baperlitbang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Besar dan Kabupaten-Kabupaten kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

- Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
  27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk

kurun waktu 5 (lima) tahunan mulai Tahun 2017–2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Baperlitbang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Baperlitbang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Baperlitbang, dan sistematika penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Baperlitbang**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Baperlitbang, sumber daya Baperlitbang, kinerja pelayanan Baperlitbang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Baperlitbang.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Baperlitbang**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, Telaah RTRW dan KLHS, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Baperlitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

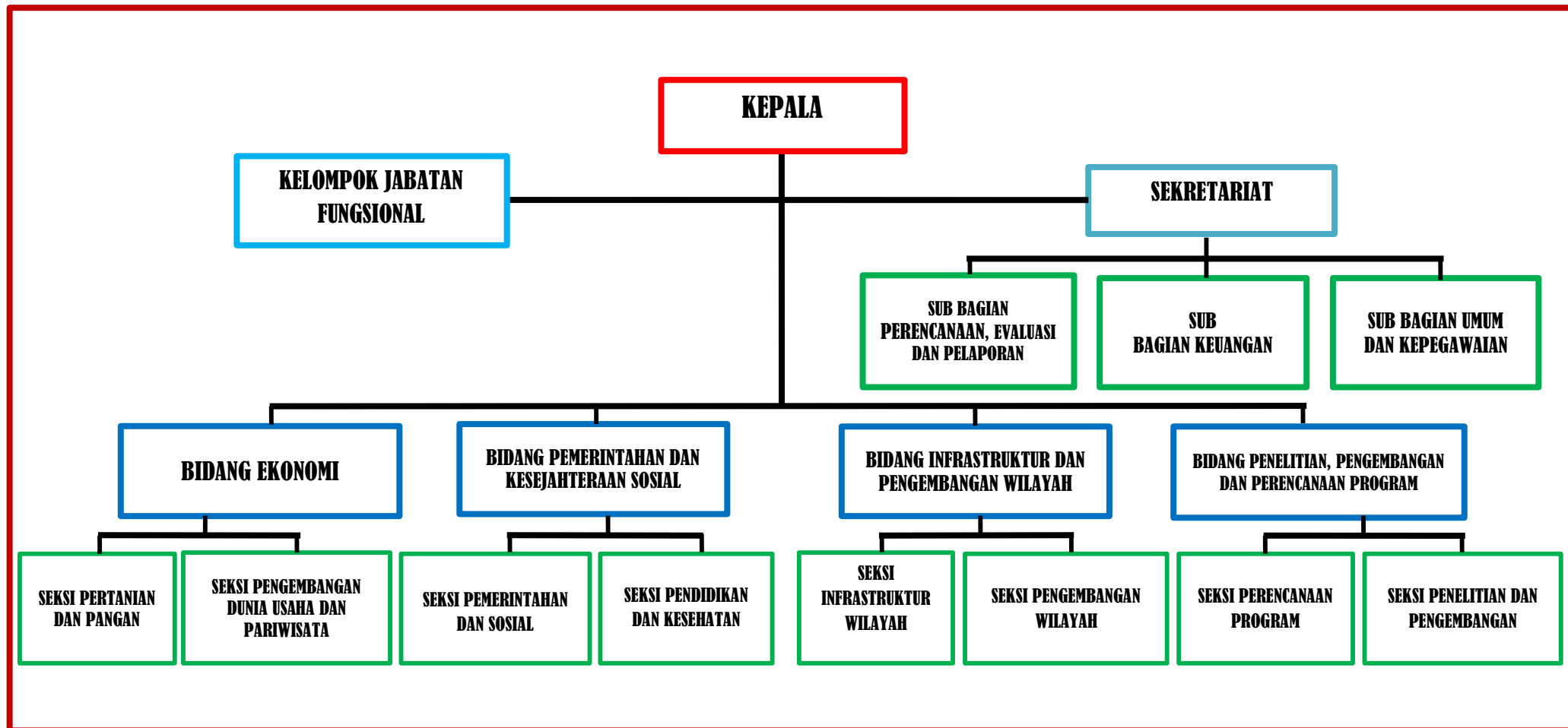
##### **2.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pertanian dan Pangan; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari
  - 1) Seksi Pemerintahan dan Sosial; dan
  - 2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
  - 1) Seksi Infrastruktur Wilayah; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program, terdiri dari
  - 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
  - 2) Seksi Perencanaan Program;
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Baperlitbang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

### **2.1.2 Uraian Tugas**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- c. pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan perencanaan

program;

- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci uraian tugas masing-masing jabatan tercantum pada uraian dibawah ini.

1. Sekretariat

a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

b. Fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Baperlitbang;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Baperlitbang;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Baperlitbang;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Baperlitbang;
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan

- perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Baperlitbang;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Baperlitbang;
  - 8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan meliputi perencanaan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Baperlitbang.
  - 2) Sub Bagian Keuangan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan anggaran di lingkungan Baperlitbang.
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Baperlitbang.

## 2. Bidang Ekonomi

### a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

### b. Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan,

koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
  - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
  - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif; dan
  - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pertanian dan Pangan dan Seksi Pengembangan Dunia



Usaha dan Pariwisata, dengan tugas :

- 1) Seksi Pertanian dan Pangan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), perikanan, ketahanan pangan.
- 2) Seksi Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

### 3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

#### a. Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Sosial dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan, dengan tugas:

- 1) Seksi Pemerintahan dan Sosial: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat

dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa, kesekretariatan daerah.

- 2) Seksi Pendidikan dan Kesehatan: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan.

#### 4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

##### a. Tugas :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian.

##### b. Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan

- ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
  - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
  - 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian; dan
  - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur Wilayah dan Seksi Pengembangan Wilayah, dengan tugas:
- 1) Seksi Infrastruktur Wilayah: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;

2) Seksi Pengembangan Wilayah: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program

a. Tugas :

melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

b. Fungsi:

- 1) perencanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

- 3) pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan

Program terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Penelitian dan Pengembangan dan Seksi Perencanaan Program, dengan tugas:

- 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan: melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penelitian atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dengan perguruan tinggi, rekomendasi izin penelitian dan pengembangan;
- 2) Seksi Perencanaan Program: melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan perencanaan bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Banjarnegara tercatat sebanyak 56 (lima puluh enam). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, dan tingkat golongan adalah sebagai berikut:

#### **a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Gambaran mengenai pegawai Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.2.



**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Baperlitbang Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
2	SMA Sederajat	7	4	7	2	20
3	D3	0	0	1	1	2
4	S1	13	7	1	3	24
5	S2	7	2	0	0	9
6	S3	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>56</b>

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMA sederajat dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2). Tingkat pendidikan pegawai Baperlitbang yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

b. Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara terbanyak adalah pegawai Golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima). Secara lengkap komposisi pegawai Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	1	9
2	Golongan III	13	12	25
3	Golongan IV	7	0	7
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>13</b>	<b>41</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk memperlancar tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2017**

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket
1	Tanah	M <sup>2</sup>	1.478	
2	Gedung Kantor	M <sup>2</sup>	754	
3	Gedung Garasi	M <sup>2</sup>	150	
4	Station Wagon	Unit	4	
5	Sepeda Motor	Unit	23	
6	GPS	Unit	2	
7	Alat Ukur/Test klinis Lain-lain	Unit	1	
8	Mesin Ketik Manual Portabel	Unit	8	
9	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	6	
10	Lemari Besi	Unit	7	
11	Rak Besi/Metal	Unit	2	
12	Rak Kayu	Unit	1	
13	Filing Besi/Metal	Unit	21	
14	Brand Kas	Unit	1	
15	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	
16	Alat Pemotong Kertas	Unit	1	
17	Perforator Besar	Unit	1	
18	OHP	Unit	1	
19	Alat Kantor Lainnya	Unit	9	
20	LCD Projector	Unit	9	
21	Lemari Kayu	Unit	4	
22	Meja Kayu	Buah	54	
23	Kursi Besi/Metal	Buah	104	
24	Kursi Kayu	Buah	25	
25	Meja Tulis	Buah	5	
26	Meja Podium	Buah	1	
27	Kursi Rapat	Buah	1	
28	Kursi Putar	Buah	7	
29	Meja Komputer	Buah	7	
30	Jam Elektronik	Unit	4	
31	Air Conditioner	Unit	7	
32	Kompas Gas	Unit	1	

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Ket
33	Tabung Gas	Unit	1	
34	Televisi	Unit	2	
35	Cassette Recorder	Unit	1	
36	Wireless Mic	Unit	1	
37	UPS	Unit	1	
38	Camera	Unit	16	
39	Dispenser	Unit	1	Rusak
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	16	
41	Personal Computer	Unit	22	
42	Laptop/Notebook	Unit	34	
43	Printer	Unit	31	9 rusak berat
44	Monitor	Unit	4	
45	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	1	Rusak berat
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	1	
47	Meja Tamu	Buah	4	
48	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	9	
49	Mikro Film	Unit	1	
50	CD Player	Unit	1	Rusak
51	Peralatan Visual Lainnya	Unit	4	
52	Film Projector	Unit	1	
53	Layar Film	Unit	2	
54	Faksimili	Unit	1	
55	Sound System	Unit	3	
56	Wireless Amplifier	Unit	2	
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	16	
58	Generator	Unit	1	
59	Panel ATS/Jaringan	Set	1	
60	Server	Unit	1	
61	Mesin Absen	Unit	1	
62	Komputer Tablet	Unit	6	
63	Sofa	unit	3	
64	CCTV	Set	1	

Sumber: Daftar Aset Tetap Bappeda per 31 Desember 2016

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa tugas dan fungsi Baperlitbang sebagian besar telah didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2011-2016) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

**Tabel 2.5**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten**  
**Banjarnegara**  
**Tahun 2011-2016**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2011	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Laporan Keuangan (CaLK)	dokumen		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
2	Tersusunnya Daftar Urut Kependudukan (DUK) dan buku penjangaan	dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
3	Tersusunnya Kartu Inventaris Barang (KIB)	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Rencana Kerja anggaran (RKA), Rencana Kerja Operasional (RKO), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Rencana Kerja (Renja)	dokumen		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
5	Keikutsertaan aparatur perencanaan dalam bintek, seminar, diklat, workshop dan lokakarya	bintek		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2011	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
7	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah (PERDA)	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
8	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen		5,39	5,42	5,61	5,89	6,07	5,23	5,44	5,31	5,47	5,41	97,9592	99,631	95,7219	92,87	89,13
11	Laju Inflasi Kabupaten	Persen		7,23	7,13	7,52	7,34	7,03	4,55	8,35	7,78	2,97	2,87	62,9322	117,111	103,457	40,46	40,83
12	PDRB perKapita	rupiah		8.011.940	8.898.060	9.882.190	10.975.160	12.189.010	13.050.000	14.330.000	16.010.000	17.570.000	19.000.000	109,345	113,924	114,297	160,09	155,88
13	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks		0,52	0,5	0,49	0,48	0,47	0,55	0,55	0,49	0,48	0,47	105,769	110	106,122	100,00	100,00
14	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
15	Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi dan investasi	dokumen		3	2	2	2	2	5	2	2	2	2	166,667	100	100	100,00	100,00
16	Penduduk di atas garis kemiskinan	Persen		82,11	84,52	86,92	89,32	91,72	81,13	81,29	82,23	81,63	82,54	98,8065	96,1784	94,6042	91,39	89,99
17	Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosbud	dokumen		1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	100	100	200	100,00	200,00
18	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pedoman penataan ruang pembangunan	dokumen		2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100	100	100	100,00	100,00
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital	Persen		33,30	66,60	100	100	100	50 dan 20	66,6 dan 66,6	100 dan 100	100 dan 100	100 dan 100	150	100	100	100	100
20	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan DAK, TP dan Dekonsentrasi	dokumen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2011	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
21	Terlaksananya evaluasi RKPD	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Ketaatan terhadap RTRW	Persen		50	50	100	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	Persen		33,30	66,60	100	100	100	66,60	66,60	100	100	100	200	100	100	100	100
24	Tersedianya Banjarnegara Dalam angka (BDA) Kab. Banjarnegara yang informatif	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
25	Tersedianya Buku PDRB Kab. Banjarnegara	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
26	Profil daerah Kab. Banjarnegara	dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
27	Teroptimalisasinya Simrenbangda dan Sistem Informasi Geografis (SIG)	SIM		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
28	Terselenggaranya kerjasama Barlingmascakeb	paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
29	Terselenggaranya penelitian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan**  
**Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2011-2016**

No	Program	Kondisi Awal 2011	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran		529.628.000	609.500.000	613.520.000	703.531.000	796.227.000	396.128.261	489.148.426	529.098.116	617.074.471	681.659.820	74,79	80,25	86,24	87,71	85,61	10,90	14,69
2	Program Peningkatan Peningkatan Sarana Dan Prsarana Aparatur		313.262.500	455.000.000	515.000.000	523.000.000	490.000.000	287.366.400	418.343.900	470.130.950	511.609.850	469.430.275	91,73	91,94	91,29	97,82	95,80	13,42	14,63
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	38.130.300	49.856.500	39.880.100	47.839.900		76,26	99,71	79,76	95,68	-	10,23
4	Program Pengembangan Data/Informasi		694.260.000	629.230.000	960.000.000	490.000.000	525.000.000	547.732.650	473.732.150	767.815.560	417.610.000	444.087.580	78,89	75,29	79,98	85,23	84,59	0,35	2,32
5	Program Kerjasama Pembangunan		-	150.000.000	125.000.000	125.000.000	225.000.000	-	128.922.550	92.989.250	108.451.200	173.163.600		85,95	74,39	86,76	76,96	21,11	16,14
6	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar		-	355.000.000	465.000.000	453.000.000	510.000.000	-	264.196.400	320.627.650	301.179.911	389.450.750		74,42	68,95	66,49	76,36	13,66	14,87
7	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan daerah		104.830.000	100.000.000	100.000.000	175.000.000	185.000.000	84.129.000	86.834.400	87.122.700	168.080.000	149.908.900	80,25	86,83	87,12	96,05	81,03	19,03	21,42
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		-	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	13.456.000	27.854.000	24.019.500	6.448.000		67,28	92,85	80,07	21,49	16,67	6,69
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1.226.147.500	875.000.000	930.000.000	955.000.000	1.450.000.000	1.095.512.270	716.253.850	848.512.600	879.274.200	1.316.709.963	89,35	81,86	91,24	92,07	90,81	8,04	9,31
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		820.000.000	510.000.000	749.275.000	575.000.000	405.000.000	775.697.315	431.534.122	568.932.150	437.884.950	329.684.725	94,60	84,61	75,93	76,15	81,40	(10,93)	(15,07)
11	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		775.000.000	750.000.000	515.000.000	365.000.000	635.000.000	563.162.900	588.556.725	383.580.690	317.764.060	579.838.492	72,67	78,47	74,48	87,06	91,31	2,57	8,75
12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		332.500.000	330.000.000	675.000.000	525.000.000	400.000.000	306.694.600	261.823.000	412.441.400	450.776.900	334.814.900	92,24	79,34	61,10	85,86	83,70	14,44	6,62



No	Program	Kondisi Awal 2011	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
13	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100.000.000					92.843.900						92,84						(100,00)
14	Program Perencanaan tata Ruang		181.500.000	250.000.000	500.000.000		250.000.000	165.819.600	196.480.500	367.001.590			130.604.335	91,36	78,59	73,40		52,24	12,58	1,76
15	Program Penataan daerah Otonomi Baru			100.000.000					74.580.000						74,58					
16	Program Perbaikan gizi masyarakat						40.000.000						39.960.000						99,90	
17	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam						150.000.000						124.537.450						83,02	
18	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						75.000.000						73.910.500						98,55	
19	Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif						250.000.000						195.950.750						78,38	
<b>Total</b>			<b>5.077.128.000</b>	<b>5.183.730.000</b>	<b>6.227.795.000</b>	<b>4.969.531.000</b>		<b>4.315.086.896</b>	<b>4.181.992.323</b>	<b>4.925.963.156</b>	<b>4.273.605.142</b>		<b>84,99</b>	<b>80,68</b>	<b>79,10</b>	<b>86,00</b>			<b>(24,49)</b>	<b>(24,63)</b>

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.5 dan 2.6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.

Misalnya : Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang hanya ada pada tahun 2012, Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang hanya ada pada tahun 2016, dan lain lain.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Baperlitbang pada lima tahun mendatang.

- a. Banyaknya peraturan yang harus dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Adanya tuntutan penyediaan dokumen perencanaan yang inovatif, kreatif dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dan mendapatkan akses terhadap informasi pembangunan daerah.
- d. Adanya persaingan antar daerah baik regional maupun nasional dalam mengembangkan potensi daerah.
- e. Tuntutan akan konsistensi antar dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan perangkat daerah.
- f. Pemenuhan terhadap pemecahan masalah daerah yang membutuhkan sumber-sumber pendanaan alternatif diluar APBD Kabupaten Banjarnegara yang sangat kompetitif.
- g. Semakin kompleksnya permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan pemecahan melalui kajian, penelitian dan pengembangan.

### **2.4.2 Peluang**

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Baperlitbang pada lima tahun mendatang.

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman perencanaan pembangunan di daerah.

- b. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan data dan informasi.
- c. Potensi pembiayaan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta, NGO maupun lembaga donor yang makin terbuka sebagai akibat dari penerapan SDG's.
- d. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga memicu para perencana untuk menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi kepada pemecahan masalah.
- e. Peluang untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah di tingkat regional, seperti BARLINGMASCAKEB.
- f. Peran CSR yang makin menguat dalam mendukung pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
- g. Meningkatnya peran perguruan tinggi sebagai mitra di dalam penelitian dan pengembangan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Baperlitbang**

Sumber daya Baperlitbang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas selama 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu :

1. Sekretariat
  - a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
  - b. Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai;
  - c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Belum optimalnya koodinasi antar bagian di Baperlitbang
  - e. Belum semua SDM memahami regulasi perencanaan penganggaran
  - f. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi
  - g. Belum optimalnya pengelolaan aset di Baperlitbang
  - h. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Baperlitbang

- i. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Renja).
- j. Belum tepat waktu dalam pelaporan keuangan
- k. Belum optimalnya penyediaan bahan-bahan bagi pelayanan administratif

## 2. Bidang Ekonomi

- a. Belum optimalnya kajian-kajian ekonomi yang ditindaklanjuti
- b. Adanya amanat peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan multi sektor bidang ekonomi
- c. Belum optimalnya fasilitasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal
- d. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing, serta strategi branding UKM dan IKM
- e. Belum tersedianya perencanaan dalam pengembangan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, serta pengembangan wisata.
- f. Belum optimalnya koordinasi bidang ekonomi dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas (Renja, KUA PPAS) di masing-masing perangkat daerah yang dibina.

## 3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

- a. Belum tercapaiannya kinerja penanggulangan kemiskinan sesuai target.
- b. Belum semua Desa Target TMMD tersentuh Program TMMD
- c. Belum optimalnya koordinasi bidang Pemkesos dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas (Renja, KUA PPAS) di masing-masing perangkat daerah yang dibina.

- d. Penyediaan data Pendidikan Untuk Semua (PUS) tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
  - e. Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang pendidikan sesuai kebutuhan.
  - f. Masih kurangnya kualitas monitoring, evaluasi dan pengawasan distribusi serta peredaran garam beryodium.
  - g. Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang kesehatan sesuai kebutuhan.
  - h. Belum semua dokumen perencanaan responsif gender.
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- a. Belum optimalnya informasi dan implementasi perencanaan pengembangan wilayah
  - b. Belum optimalnya perencanaan kawasan strategis kabupaten yang memberikan multiplier effect terhadap pengembangan wilayah disekitarnya
  - c. Belum tersedianya database potensi wilayah secara detail
  - d. Belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah, sehingga terjadi disparitas/ kesenjangan pembangunan wilayah utara dan selatan
  - e. Belum optimalnya koordinasi dengan dinas teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
  - f. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang (struktur dan pola ruang) dalam pengembangan wilayah
  - g. Masih tumpang tindih kewenangan penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan dinas teknis
  - h. Belum tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program
  - a. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah
  - b. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran
  - c. Rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur perencana.
  - d. Masih belum terintegrasinya hasil musrenbang desa dan kelurahan dalam e-planning and e-budgeting.
  - e. Belum tersedianya Rencana Induk Kelitbang.
  - f. Belum optimalnya penyelenggaraan kerjasama
  - g. Belum banyak institusi (OPD) yang mengusulkan penelitian untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan.
  - h. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan perencanaan bidang penelitian
  - i. Belum optimalnya koordinasi dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penelitian
  - j. Belum optimalnya pelayanan rekomendasi ijin penelitian.
  - k. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan penelitian

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Baperlitbang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

**a. Visi**

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022, Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, adalah :

***“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”***

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

**1. Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten Yang Bermartabat**

Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

**2. Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten Yang Sejahtera**

Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.



Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

**b. Misi**

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel 3.1 memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

**Tabel. 3.1**  
**Perumusan Misi Kabupaten Banjarnegara**

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan menuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut, maka Baperlitbang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting mendukung pencapaian misi pertama.

Sedangkan analisis Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam peningkatan kinerja pelayanan Baperlitbang dalam upaya mendukung pencapaian misi tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><b>Misi:</b> Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik</p>	<p>Tidak adanya inventarisasi dan tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian yang bisa dijadikan pijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;</li> <li>▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>▪ Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;</li> <li>▪ Banyak</li> </ul>

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;</li> <li>▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2017-2022

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah: "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel". Pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Berkualitas: perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.
2. Sinergis: produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah.
3. Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based dan knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Dalam rangka mencapai visi, misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendukung pelaksanaan Misi ke-1 dan Misi ke-2. Tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas pada misi ke-1 dan Misi ke-2 yaitu: Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, dengan sasaran: Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam**  
**Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Kementerian PPN/Bappenas**

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><b>Visi:</b> "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel".</p> <p><b>Tujuan:</b> Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.</p> <p><b>Sasaran:</b> Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel", yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;</li> <li>▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>▪ Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;</li> <li>▪ Banyak pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana;</li> </ul>

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
ditindaklanjuti K/L.			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;</li> <li>▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.</li> </ul>

### 3.3.2 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3 yang terkait dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan adalah Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.



Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.</p> <p>Misi ke-2: Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah</li> <li>▪ Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> <li>▪ Belum optimalnya fasilitasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal</li> <li>▪ Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing, serta strategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;</li> <li>▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;</li> <li>▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>administrasi kependudukan.</p> <p>Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3:</p> <p>a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah:</p> <p>b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;</p> <p>c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;</p> <p>d. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan</p>	<p>branding UKM dan IKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya perencanaan kawasan strategis kabupaten yang memberikan multiplier effect terhadap pengembangan wilayah disekitarnya</li> </ul>		<p>Kabupaten Banjarnegara ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;</li> <li>▪ Banyak pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana;</li> <li>▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;</li> <li>▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.</li> </ul>

Uraian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.			

### 3.3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah adalah **"Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan."**

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda Provinsi Jawa Tengah secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan dengan fokus pada :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;
- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian**  
**Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun**  
**2013-2018**

Tujuan dan sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;</p> <p>b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;</p> <p>c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;</p> <p>d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah</li> <li>▪ Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> <li>▪ Belum optimalnya fasilitasi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal</li> <li>▪ Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas dan daya saing, serta strategi branding UKM dan IKM</li> <li>▪ Belum optimalnya perencanaan kawasan strategis kabupaten yang memberikan multiplier effect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;</li> <li>▪ Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara ;</li> <li>▪ Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara ;</li> <li>▪ Lembaga strategis perencanaan yang</li> </ul>

Tujuan dan sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	terhadap pengembangan wilayah disekitarnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki kewenangan koordinatif;</li> <li>▪ Banyak pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebagian Pasca Sarjana;</li> <li>▪ Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;</li> <li>▪ Sarana dan prasarana kerja yang memadai.</li> </ul>

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Baperlitbang ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Baperlitbang. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

2. Belum optimalnya kualitas perencanaan multi sektor di bidang ekonomi.
3. Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang pemkesos yang sesuai kebutuhan.
4. Belum optimalnya perencanaan, penataan infrastruktur dan pengembangan wilayah, sehingga terjadi disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM serta sarana prasarana penunjang kinerja Baperlitbang.
7. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan Baperlitbang.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Baperlitbang**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas;
2. Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan daerah;
3. Terwujudnya Pelayanan Prima.

### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang**

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan sasaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan;
2. Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah;
3. Meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah;
4. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

**Tujuan 1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas.**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan .
2. Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah

**Tujuan 2. Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan daerah.**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah.

**Tujuan 3. Terwujudnya Pelayanan Prima.**

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2017-2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kon disi Awal 201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan	persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah			%		90	91	92	93	94	94
				<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan program RKPD, KUA PPAS dan Renstra dengan RPJMD</b>	%	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
				Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD	dokumen	85	2	2	2	2	2	2
				Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	dokumen	2	2	2	2	2	2	2
				Evaluasi RKPD	Laporan Akhir Evaluasi RKPD	dokumen	2	1	1	1	1	1	1
				Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD 2022	dokumen	1	0	0	0	0	1	1

				-2027									
				Penyusunan Review RPJMD	Dokumen Review RPJMD	dokumen	0	0	0	1	0	0	0
				Penyusunan Raperda RPJMD	Raperda RPJMD 2022-2027 dan Review RPJMD 2017-2022	dokumen	2	0	0	1	0	1	1
				Pengembangan e planing dan e budgeting	e planing yang terintegrasi e budgeting	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
				<b>Program Program pengembangan data/informasi</b>	<b>prosentase data base dan informasi yang tersedia</b>	%	<b>85</b>	<b>0,9</b>	<b>0,95</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sektoral dan DAK	Laporan Akhir Monev Kegiatan Sektoral dan DAK	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
				Pendamping penyusunan profil daerah	jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2	2
		Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian indikator kinerja RPJMD			%	70	75	80	85	100	100	
			<b>Program Perencanaan Prasarana</b>	<b>Persentase capaian kinerja</b>		%	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Wilayah dan SDA</b>	<b>bidang/urusan Prasarana Wilayah</b>								
Kajian pola penggunaan lahan Kab. Banjarnegara	Dokumen kajian pola penggunaan lahan Banjarnegara	dokumen	0	1	0	0	0	0	0
Pemetaan geologi kawasan dataran tinggi Dieng	Peta geologi kawasan dataran tinggi Dieng	dokumen	0	1	0	0	0	0	0
Penyusunan neraca sumber daya alam spasial daerah	Dokumen neraca sumber daya alam spasial daerah	dokumen	0	0	1	0	0	0	0
Kajian pengembangan jalan Banjarkebuka (Banjar-Kebumen-Pekalongan)	Dokumen kajian pengembangan jalan Banjarkebuka	dokumen	0	0	1	0	0	0	0
Penyusunan buku saku infrastruktur dan penataan ruang	Buku saku infrastruktur dan penataan ruang	dokumen	0	1	0	0	0	0	0
Penyusunan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)	Dokumen RPIJM	dokumen	0	0	0	1	0	0	0
<b>Program perencanaan pengembangan wilayah</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan</b>	<b>%</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>n Prasarana Wilayah</b>								
Kajian infrastruktur kawasan strategis	Dokuman kajian infrastruktur kawasan strategis	dokumen	0	0	1	0	0	0	0
Optimalisasi perencanaan pengembangan wilayah	terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12
Penyusunan master plan Kota Purwareja-Klampok	Dokumen master plan Kota Purwareja-Klampok	dokumen	0	0	1	0	0	0	0
Penyusunan master plan drainase	Dokumen master plan drainase	dokumen	0	0	0	1	0	0	0
<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Prasarana Wilayah</b>	%	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Asistensi pengembangan kota	asistensi pengembangan kota	bulan	0	0	12	12	12	12	12
Optimalisasi pokja AMPL	adanya koordinasi pokja AMPL	bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyusunan master plan infrastruktur perkotaan	Dokumen master plan infrastruktur perkotaan	dokumen	1	1	0	0	0	0	0
Koordinasi pengembangan	koordinasi pengembangan	Bulan	0	0	12	12	12	12	12

				kota dan penanganan perumahan	n kota dan penanganan perumahan									
				<b>Program pengembangan wilayah perbatasan</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Prasarana Wilayah</b>	%	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
				Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Dokumen perencanaan pengembangan perbatasan	dokumen	-	1	2	2	2	2	2	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Ekonomi</b>	%	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				Laju Inflasi Kabupaten	Perencanaan pengembangan ekonomi lokal	adanya dokumen pengembangan ekonomi lokal	dokumen/rekomendasi	1	0	1	1	1	1	1
				PDRB per Kapita	FS Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	dokumen fasilitas umum	dokumen/rekomendasi	11	1	0	1	0	1	1
				Indek Kerimpangan Wiliamson	Pengembangan ekonomi hijau GE-lama I	dokumen pengembangan ekonomi hijau	dokumen/rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1
				Kontribusi UKM terhadap PDRB	Forum pengembangan FEDEP	Forum Pengembangan Ekonomi (FEDEP)	dokumen/rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1
				Pertumbuhan Sektor	Pendamping FEDEP	Pemantapan re-organisasi	dokumen/	1	1	1	1	1	1	1

Industri  Pertumbuhan Sektor Perdagangan		pengurus FEDEP	rekomendasi							
	Penyusunan Indikator ekonomi daerah	dokumen indikator ekonomi daerah	dokumen/rekomendasi	0	1	1	1	1	1	1
	Penyusunan dan perencanaan pengembangan destinasi wisata kreatif Kab. Banjarnegara	pengembangan destinasi wisata kreatif	dokumen/rekomendasi	0	1	0	0	0	1	1
	Perencanaan dan penyusunan kajian tindak ketahanan pangan	kajian tindak ketahanan pangan	dokumen/rekomendasi	0	0	1	0	0	0	0
	Kajian pengembangan potensi ekonomi kreatif	Kajian pengembangan potensi ekonomi kreatif	dokumen/rekomendasi	0	0	1	0	0	1	1
	Perencanaan dan pengembangan kerjasama dunia usaha/ekonomi	pengembangan kerjasama dunia usaha/ekonomi	dokumen/rekomendasi	0	1	0	1	0	1	1
	Penyusunan dan kajian FS komoditas unggulan daerah	kajian FS komoditas unggulan daerah	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0
	Penyusunan RAD pangan dan gizi	Jumlah dokumen RAD pangan dan gizi	Dokumen	0	0	0	1	0	1	1
	Penyusunan Review Rencana	Jumlah dokumen	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0

Induk Kepariwisataa	Review Rencana Induk Kepariwisataa n								
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembang an Kawasan Industri	Dokum en	0	0	0	0	1	0	0
Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pasar Tradisional	Jumlah Rencana Pengembang an Infrastruktur Pasar Tradisional	Dokum en	0	0	0	1	0	0	0
Penyusunan Grand Desain Pengembangan Agrowisata	Jumlah dokumen Grand Desain Pengembang an Agrowisata	Dokum en	0	0	0	0	1	0	0
Penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan	Jumlah rencana induk pengembang an kebudayaan	Dokum en	0	0	0	1	0	0	0
Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Masterplan Pengembang an Penanaman Modal	Dokum en	0	0	1	0	0	0	0
Penyusunan RAD Ecowisata	Jumlah Dokumen RAD Ecowisata	Dokum en	0	0	0	1	0	0	0

			Persentase Penduduk Miskin			%	17 s.d. 16,5	16,4 s.d. 15,8	15,8 s.d. 15,2	15,2 s.d. 14,6	14,6 s.d. 14	14,6 s.d. 14
				<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Pemkesos</b>	%	<b>38,46</b>	<b>61,54</b>	<b>68,23</b>	<b>72,85</b>	<b>79,45</b>	<b>79,45</b>
					<b>Persentase Program yang mendukung penurunan angka kemiskinan</b>	%	<b>38%</b>	<b>38%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
				Kegiatan penunjang program penanggulangan kemiskinan	Tersediannya dokumen SPKD periode 2021-2026	dok	0	0	0	1	1	1
					Jumlah pertemuan koordinasi TKPKD	kali	0	7	7	7	7	7
				Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Tersedian dok laporan Lp2KD setiap tahun	dok	0	1	1	1	1	1
				Kegiatan Asistensi TMMD	Dok renum TMMD	dok	0	1	1	1	1	1
				Kegiatan pendidikan untuk semua	updating data PUS	kali	1	6	6	6	6	6
				Kegiatan Penunjang PUS	dok pelaporan PUS	dok	1	1	1	1	1	1
				Penyusunan kajian indeks biaya pendidikan	dok kajian indeks biaya pendidikan	dok	0	0	0	1	0	0



			dasar	dasar								
			Kajian Roadmap Rata-rata lama sekolah	dok roadmap	dok	0	0	0	0	1	0	0
			Kajian Pengembangan sekolah inklusi	dok kajian pengembangan sekolah inklusi	dok	0	0	0	1	0	0	0
			Pengembangan kelembagaan vokasi di Kecamatan	dok pengembangan kelembagaan vokasi	dok	0	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan GAKI	Tersedia data GAKI melalui SIMGAKI	dok	1	1	1	1	1	1	1
		jumlah titik pantau pengawasan		titik	0	6	6	6	6	6	6	6
		Jumlah petugas internal GAKI yang dilatih		orang	35	35	35	35	35	35	35	35
			Kegiatan penyusunan analisa AKI AKB	Dok Analisa AKI dan AKB	dok	0	0	1	0	0	0	0
			<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Pemkesos</b>	%	<b>0</b>	<b>38%</b>	<b>44%</b>	<b>49%</b>	<b>54%</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>
			Kegiatan Asistesni PPRG	Jumlah OPD yang menyusun analisis Gender (GBS, GAP/PROBA)	OPD	0	22	22	22	22	22	22
				Jumlah orang	orang	22	22	22	22	22	22	22

					yang memiliki kapasitas SIGA									
2	Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah	Presentase peningkatan jumlah penelitian dan inovasi yang terjaring			%	0,7	0,75	0,8	0,85	90%	90%		
				<b>Program Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>prosentase Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti</b>	%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
				Kerjasama perguruan tinggi	jumlah pelaksanaan KKN	jumlah	6	8	9	10	11	12	12	
				<b>Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Kegiatan KeLitbangan yang dimanfaatkan Stakeholder yang dijadikan Rumusan Kebijakan</b>	%	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>		
				Pembinaan dan pengembangan jaringan kelitbangan	Jumlah Dokumen RIK	paket	-	1	0	0	0	0	0	
					Jumlah Dokumen	paket	-	2	3	3	3	4	4	

				Rencana Aksi Tahunan Kelitbangan									
				Pengembangan sistem inovasi daerah	Jumlah Dokumen Roadmap Sistim Inovasi Daerah	paket	-	1	0	0	0	0	0
					Jumlah terfasiltasinya Pemenang Lomba Krenova	orang	2	3	4	4	4	5	5
				Tersusunnya Riset Unggulan Daerah	Terbentuk Dewan Riset Daerah	dok	-	1	0	0	0	0	0
					Jumlah Riset Unggulan Daerah yang dilaksanakan	unit	-	2	3	4	4	5	5
					Fasilitasi Dewan Riset Daerah	keg	-	2	2	3	3	4	4
				Penyusunan Kajian Pembangunan Daerah	Aplikasi Data Base Kelitbangan tersusun	paket	-	0	1	0	0	0	0
					Aplikasi Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian tersusun	paket	-	0	1	0	0	0	0
					Jumlah Rekomendasi Penelitian	unit	-	400	450	500	550	600	600
3	Terwujudnya Pelayanan	Meningkatnya Nilai Survey	Skor/Nilai SKM			skor		81	82	83	84	85	85

	Prima	Kepuasan Masyarakat											
				<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase Tercukupinya kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	pembayaran listrik, air, internet dan telepon	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya kebutuhan pembayaran pengelola APBD SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				penyediaan bahan logistik kantor	bahan logistik kantor dan terfalitasinya perjalanan dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga pendukung operasional kantor/THL)	terpenuhinya gaji PTT dan THL	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				<b>Program Peningkatan sarana dan</b>	<b>Persentase sarana prasarana</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>prasarana aparatur</b>	<b>dalam kondisi baik</b>								
pengadaan perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor	Paket	0	1	1	1	1	1	1
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a kondisi gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharany a perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
<b>Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase aparatur perencanaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparatur baperlitbang yang mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan teknis	Orang	0	15	15	15	10	5	5
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase keselarasan antar dokumen internal Baperlitbang</b>	%	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKjIP, PK, RKT, POK, RKA, RKO, Renja ,DPA, DPPA. LRA, Neraca dan CaLK.	Dok	13	13	13	14	14	14	14
				Dokumen Renstra, LKPJ								
			<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Persentase capaian Aksi PPK</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
			Rencana Aksi Daerah (AD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan pelaksanaan dokumen Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	dok	4	4	4	4	4	4	4

KEPALA BAPERLITBANG  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**MULYANTO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590319 198607 1 003

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Baperlitbang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan melalui intensitas koordinasi antar OPD dan Bidang; intensitas verifikasi dan konsultasi dengan OPD dan bidang; Intensitas monitoring dan Evaluasi
2. Meningkatkan kualitas dok perencanaan pemkesos melalui penyusunan dokumen sesuai dengan ketentuan, penigkatan kapasitas OPD yang menjadi tanggungjawab pemkesos, dan menindaklanjuti dokumen perencanaan kedalam dokumen pelaksanaan kegiatan diOPD
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui kajian sesuai kebutuhan OPD, rekomendasi /isi kajian yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengakomodir kebutuhan PD dan masyarakat pembangunan ekonomi
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah melalui peningkatan koordinasi dengan OPD teknis, pengembalian fungsi perencanaan pembangunan kepada bappelitbang, penyusunan kajian, penyusunan data base infrastruktur dan pengembangan wilayah
5. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan Yang Berkualitas melalui Peningkatan kualitas dan jumlah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan untuk OPD penjaringan gagasan kepada OPD, penerbitan SE bupati agar kegiatan yang disusun berdasarkan hasil penelitian.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar bidang, perluasan akses

informasi, pemeliharaan aset-aset, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyediaan bahan-bahan perencanaan, akuntabilitas pelaporan keuangan tepat waktu, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan melalui penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) dengan RPJMD dan RKPD, penyusunan panduan menyusun Renstra dan Renja, sinkronisasi program kegiatan antar bidang, penyusunan sistem data, penguatan SDM perencana dan workshop telaah Renstra dan Renja lebih awal

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas keselarasan antar dokumen perencanaan dengan fokus pada dokumen APBD dengan RKPD dan RKPD dengan RPJMD.
2. Penyusunan dokumen pemkesos difokuskan pada dokumen perencanaan pemkesos yang strategis
3. Peningkatan kualitas dokumen pembangunan ekonomi dengan fokus pada pertanian dan pangan, pengembangan duania usaha dan pariwisata.
4. Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah
5. Meningkatkan jumlah penelitian yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan dengan fokus pada OPD teknis yang mengampu prioritas
6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus pada penguatan sumberdaya manusia khususnya ketersediaan aparatur fungsional perencana dan peneliti.
7. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan dengan fokus pada keselarasan antara dokumen Renstra dengan



RPJMD dan Renja dengan RKPD serta dokumen pelaporan keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Baperlitbang**  
**Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan	Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan melalui intensitas koordinasi antar OPD dan Bidang; intensitas verifikasi dan konsultasi dengan OPD dan bidang; Intensitas monitoring dan Evaluasi	Peningkatan kualitas keselarasan antar dokumen perencanaan dengan fokus pada dokumen APBD dengan RKPD dan RKPD dengan RPJMD.
		Meningkatkan kualitas dok perencanaan pemkesos melalui penyusunan dokumen sesuai dengan ketentuan, peningkatan kapasitas OPD yang menjadi tanggungjawab pemkesos, dan menindaklanjuti dokumen perencanaan kedalam dokumen pelaksanaan kegiatan diOPD	Penyusunan dokumen pemkesos difokuskan pada dokumen perencanaan pemkesos yang strategis
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui kajian sesuai kebutuhan OPD, rekomendasi/ isi kajian yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengakomodir kebutuhan PD dan masyarakat pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas dokumen pembangunan ekonomi dengan fokus pada pertanian dan pangan, pengembangan duania usaha dan pariwisata.
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah melalui peningkatan koordinasi dengan OPD teknis, pengembalian fungsi perencanaan pembangunan kepada	Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		bappelitbang, penyusunan kajian, penyusunan data base infrastruktur dan pengembangan wilayah	
	Meningkatnya capain kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan melalui penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) dengan RPJMD dan RKPD, penyusunan panduan menyusun Renstra dan Renja, sinkronisasi program kegiatan antar bidang, penyusunan sistem data, penguatan SDM perencana dan workshop telaah Renstra dan Renja lebih awal	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan dengan fokus pada keselarasan antara dokumen Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD serta dokumen pelaporan keuangan.
Terwujudnya Inovasi yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas melalui Peningkatan kualitas dan jumlah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan untuk OPD; penjangangan gagasan kepada OPD, penerbitan SE bupati agar kegiatan yang disusun berdasarkan hasil penelitian.	Meningkatkan jumlah penelitian yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan dengan fokus pada OPD teknis yang mengampu prioritas
Terwujudnya Pelayanan Prima	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar bidang, perluasan akses informasi, pemeliharaan aset-aset, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyediaan bahan-bahan perencanaan, akuntabilitas pelaporan	Peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus pada penguatan sumberdaya manusia khususnya ketersediaan aparatur fungsional perencana dan peneliti.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		keuangan tepat waktu, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2017-2022**

##### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Penyusunan RKPD
- b. Penyusunan KUA dan PPAS
- c. Evaluasi RKPD
- d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sektoral dan DAK
- e. Penyusunan RPJMD
- f. Penyusunan Review RPJMD
- g. Penyusunan Raperda RPJMD
- h. Pengembangan e planing dan e budgeting

##### **2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

- a. Kegiatan penunjang program penanggulangan kemiskinan
- b. Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan
- c. Kegiatan Asistensi TMMD
- d. Pembinaan OPD terkait dalam penyusunan kualitas Renja, dan KUA PPAS
- e. Kegiatan pendidikan untuk semua
- f. Kegiatan Penunjang PUS
- g. Penyusunan kajian indeks biaya pendidikan dasar
- h. Kajian Roadmap Rata-rata lama sekolah
- i. Kajian Pengembangan sekolah inklusi
- j. Pengembangan kelembagaan vokasi di Kecamatan
- k. Kegiatan GAKI
- l. Kegiatan penyusunan analisa AKI AKB
- m. Kegiatan Asistesni PPRG

### **3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- a. Perencanaan pengembangan ekonomi lokal
- b. FS Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
- c. Pengembangan ekonomi hijau GE-lama I
- d. Forum pengembangan FEDEP
- e. Pendamping FEDEP
- f. Penyusunan Indikator ekonomi daerah
- g. Penyusunan dan perencanaan pengembangan destinasi wisata kreatif Kab. Banjarnegara
- h. Perencanaan dan penyusunan kajian tindak ketahanan pangan
- i. Kajian pengembangan potensi ekonomi kreatif
- j. Perencanaan dan pengembangan kerjasama dunia usaha/ekonomi
- k. Penyusunan dan kajian FS komoditas unggulan daerah
- l. Penyusunan RAD pangan dan gizi
- m. Penyusunan Masterplan pengembangan ekonomi kreatif
- n. Penyusunan Masterplan ketenagakerjaan
- o. Penyusunan Review Rencana Induk Kepariwisata
- p. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri
- q. Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pasar Tradisional
- r. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Komoditas per Kecamatan
- s. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Agrowisata
- t. Penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan
- u. Penyusunan Cetak Biru (Masterplan) Pengembangan Penanaman Modal
- v. Penyusunan RAD Ecowisata

- 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA**
  - a. Kajian pola penggunaan lahan Kab. Banjarnegara
  - b. Pemetaan geologi kawasan dataran tinggi Dieng
  - c. Masterplan infrastruktur perkotaan
  - d. Penyusunan neraca sumber daya alam
  - e. Kajian pengembangan jalan Banjarkebuka (Banjar-Kebumen-Pekalongan)
  - f. Penyusunan buku saku infrastruktur dan penataan ruang
  - g. Penyusunan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)
  
- 5. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**
  - a. Kajian infrastruktur kawasan strategis
  - b. Optimalisasi perencanaan pengembangan wilayah
  - c. Penyusunan master plan Kota Purwareja-Klampok
  - d. Penyusunan master plan drainase
  
- 6. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar**
  - a. Asistensi pengembangan kota
  - b. Optimalisasi pokja AMPL
  - c. Penyusunan master plan infrastruktur perkotaan
  - d. Koordinasi pengembangan kota dan penanganan perumahan
  
- 7. Program pengembangan wilayah perbatasan**
  - a. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
  
- 8. Program Program pengembangan data/informasi**
  - a. Pendamping penyusunan profil daerah
  
- 9. Program Program Kerjasama Pembangunan**
  - a. Kerjasama perguruan tinggi

**10. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- a. Pembinaan dan pengembangan jaringan kelitbang
- b. Pengembangan sistem inovasi daerah
- c. Tersusunnya Riset Unggulan Daerah
- d. Penyusunan Kajian Pembangunan Daerah

**11. Program pelayanan administrasi perkantoran**

- a. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- b. penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- d. penyediaan bahan logistik kantor
- e. penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga pendukung operasional kantor/THL)

**12. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

- a. pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

**13. Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  
Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

**14. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan  
capaian kinerja dan keuangan**

- a. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan  
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**

- a. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



## **5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah**

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tercantum pada Tabel 5.1.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Baperlitbang**

**Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab			
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		Rp (juta)	target	Rp (juta)
<b>Bidang Litbang PP</b>																				
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif	Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan	<b>Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan program RKPD, KUA PPAS dan Renstra dengan RPJMD</b>		50	90	930	91	1000	92	1.475	93	1.085	94	1.635	92	6.125	<b>Bidang Litbang PP</b>	
			Penyusunan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD	dokumen	2	2	400	2	410	2	420	2	430	2	440	10	2.100		
			Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan	dokumen	2	2	350	2	375	2	375	2	400	2	400	10	1.900		
			Evaluasi RKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Evaluasi	dokumen	1	1	100	1	125	1	150	1	150	1	175	5	700		
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sektoral dan DAK	Tersusunnya Laporan Akhir Monev Kegiatan Sektoral dan DAK	dokumen	1	1	50	1	60	1	60	1	75	1	75	5	320		

			Penyusunan RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD 2022-2027	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	425	1	425
			Penyusunan Review RPJMD	Tersusunnya Dokumen Review	dokumen	0	0	0	0	0	1	350	0	0	0	0	1	350
			Penyusunan Raperda RPJMD	Tersusunnya Raperda RPJMD 2022-2027 dan Review RPJMD 2017-2022	dokumen	2	0	0	0	0	1	90	0	0	1	90	2	180
			Pengembangan e planing dan e budgeting	Terlaksananya e planing yang terintegrasi e budgeting	dokumen	1	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
<b>Bidang Pemkesos</b>																		
Mewujudkan capaian kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya capaian kinerja Pembangunan Daerah	1. Persentase capaian indikator kinerja RPJMD																
		2. Persentase Penduduk Miskin					17,00		16,40		15,80		15,2		14,6		14,6	
		<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Pemkesos</b>	%	<b>38,46</b>	<b>38,46</b>	265	<b>61,54</b>	415	<b>68,23</b>	415	<b>72,85</b>	340	<b>79,45</b>	265	<b>84,62</b>	1.700	<b>Pemkesos</b>

Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kesejahteraan Masyarakat			Persentase Program yang mendukung penurunan angka kemiskinan	%	30,00	30,00												
			Kegiatan penunjang program penanggulangan kemiskinan	Tersediannya dokumen SPKD periode 2021-2026	dok	0	0	200	0	200	1	250	1	275	1	275	3	1.200
				Jumlah pertemuan koordinasi TKPKD	kali	0	7		7		7		7		7		35	
			Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Tersedian dok laporan Lp2KD setiap tahun	dok	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
			Kegiatan Asistensi TMMD	Dok renum TMMD	dok	0	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	5	225
			Kegiatan pendidikan untuk semua	Jumlah rapat koordinasi PUS	kali	0	6	50	6	50	6	50	6	50	6	50	30	250
			Kegiatan Penunjang PUS	dok pelaporan PUS	dok	0	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
			Penyusunan kajian indeks biaya pendidikan dasar	dok kajian indeks biaya pendidikan dasar	dok	0	0	0	0	0	1	75	0	0	0	0	1	75
			Kajian Roadmap Rata-rata lama sekolah	dok roadmap	dok	0	0	0	0	0	0	0	1	75	0	0	1	75
			Kajian Pengembangan sekolah inklusi	dok kajian pengembangan sekolah inklusi	dok	0	0	0	0	0	1	75	0	0	0	0	1	75

			Pengembangan kelembagaan vokasi di Kecamatan	dok pengembangan kelembagaan vokasi	dok	0	0	0	1	75	0	0	0	0	0	0	1	75	
			Kegiatan GAKI	Tersedia data GAKI melalui SIMGAKI	dok	0	1		1		1		1		1		1		
				jumlah titik pantau pengawasan	titik	0	6	40	6	40	6	40	6	40	6	40	30	200	
				Jumlah petugas internal GAKI yang dilatih	orang	0	35		35		35		35		35		175		
			Kegiatan penyusunan analisa AKI AKB	dok Analisa AKI dan AKB	dok	0	0	0	1	75	0	0	0	0	0	0	1	75	
			Kegiatan Asistesni PPRG	Jumlah OPD yang menyusun analisi Gender (GBS, GAP/PROBA)	OPD	0	22	50	22	50	22	50	22	50	22	50	110	250	
				Jumlah orang yang memiliki kapasitas SIGA	orang	0	22		22		22		22		22		110		
<b>Bidang Ekonomi</b>																			
<b>Mewujudkan capaian kinerja pembangunan daerah</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja RPJMD</b>																	<b>Ekonomi</b>

	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/ urusan Ekonomi</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>610</b>	<b>75</b>	<b>1700</b>	<b>80</b>	<b>1755</b>	<b>85</b>	<b>1820</b>	<b>100</b>	<b>1490</b>	<b>100</b>	<b>7375</b>	
	Perencanaan pengembangan ekonomi lokal	Tersusunnya pengembangan ekonomi lokal	dokumen/ rekomendasi	1	0	0	1	210	1	220	1	230	1	240	4	900	
	FS Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Tersusunnya dokumen fasilitas umum	dokumen/ rekomendasi	1	1	100	1	130	1	135	1	140	1	145	5	650	
	Pengembangan ekonomi hijau GE-lama I	Terlaksananya ekonomi hijau	dokumen/ rekomendasi	1	1	100	1	210	1	220	1	230	1	240	5	1.000	
	Forum pengembangan FEDEP	Terkoordinasinya Forum Pengembangan Ekonomi (FEDEP)	dokumen/ rekomendasi	1	1	55	1	100	1	110	1	110	1	120	5	495	
	Pendamping FEDEP	Pemantapan re-organisasi pengurus FEDEP	dokumen/ rekomendasi	1	1	80	1	80	1	90	1	90	1	100	5	440	
	Penyusunan Indikator ekonomi daerah	Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah	dokumen/ rekomendasi	0	1	75	1	80	1	85	1	85	1	90	5	415	
	Penyusunan dan perencanaan pengembangan destinasi wisata kreatif Kab. Banjarnegara	Tersusunnya pengembangan destinasi wisata kreatif	dokumen/ rekomendasi	0	1	100	1	150	1	155	1	155	1	160	5	720	

		Perencanaan dan penyusunan kajian tindak ketahanan pangan	Tersusunnya kajian tindak ketahanan pangan	dokumen/ rekomendasi	0	0	0	1	150	1	155	1	155	1	160	4	620
		Kajian pengembangan potensi ekonomi kreatif	Terlaksananya Kajian pengembangan potensi ekonomi kreatif	dokumen/ rekomendasi	0	0	0	1	150	1	155	1	155	1	160	4	620
		Perencanaan dan pengembangan kerjasama dunia usaha/ekonomi	Terlaksananya pengembangan kerjasama dunia usaha/ekonomi	dokumen/ rekomendasi	0	1	100	1	100	1	150	1	200	1	240	5	790
		Penyusunan dan kajian FS komoditas unggulan daerah	Tersusunnya kajian FS komoditas unggulan daerah	Dokumen	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
		Penyusunan RAD pangan dan gizi	Jumlah dokumen RAD pangan dan gizi	Dokumen	0	0	0	0	0	1	50	0	0	1	75	2	125
		Penyusunan Review Rencana Induk Kepariwisataa n	Jumlah dokumen Review Rencana Induk Kepariwisataa n	Dokumen	0	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	200

			Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pasar Tradisional	Jumlah Rencana Pengembangan Infrastruktur Pasar Tradisional	Dokumen	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	1	200	
			Penyusunan Grand Desain Pengembangan Agrowisata	Jumlah dokumen Grand Desain Pengembangan Agrowisata	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	300	0	0	1	300	
			Penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan	Jumlah rencana induk pengembangan kebudayaan	Dokumen	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100	
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Masterplan Pengembangan Penanaman Modal	Dokumen	0	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0	1	150	
			Penyusunan RAD Ecowisata	Jumlah Dokumen RAD	Dokumen	0	0	0	0	0	1	150	0	0	0	0	1	150	
<b>Bidang IPW</b>																			
<b>Mewujudkan capaian kinerja pembangunan daerah</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja RPJMD</b>																	
			<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/ urusan Prasarana Wilayah</b>	%	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>1055</b>	<b>80</b>	<b>610</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>410</b>	<b>1.680</b>	<b>IPW</b>
			Kajian pola penggunaan lahan Kab. Banjarnegara	Dokumen kajian pola penggunaan lahan Banjarnegara	dokumen	0	1	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150



			Pemetaan geologi kawasan dataran tinggi Dieng	Peta geologi kawasan dataran tinggi Dieng	dokumen	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
			Penyusunan neraca sumber daya alam spasial daerah	Dokumen neraca sumber daya alam spasial daerah	dokumen	0	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0	1	150	
			Kajian pengembangan jalan Banjarkebuka (Banjar-Kebumen-Pekalongan)	Dokumen kajian pengembangan jalan Banjarkebuka	dokumen	0	0	0	1	250	0	0	0	0	0	0	1	250	
			Penyusunan buku saku infrastruktur dan penataan ruang	Buku saku infrastruktur dan penataan ruang	dokumen	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	
			Penyusunan RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)	Dokumen RPIJM	dokumen	0	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	1	300	
			<b>Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Prasarana</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>505</b>	<b>80</b>	<b>310</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>410</b>	<b>950</b>	<b>IPW</b>
			Kajian infrastruktur kawasan strategis	Dokuman kajian infrastruktur kawasan strategis	dokumen	0	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0	0	-	

		Optimalisasi perencanaan pengembangan wilayah	terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah	Bulan	0	0	0	12	55	12	60	12	65	12	70	48	250	
		Penyusunan master plan Kota Purwareja-Klampok	Dokumen master plan Kota Purwareja-Klampok	dokumen	0	0	0	1	300	0	0	0	0	0	0	1	300	
		Penyusunan master plan drainase	Dokumen master plan drainase	dokumen	0	0	0	0	0	1	250	0	0	0	0	1	250	
		<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Prasarana Wilayah</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>500</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	<b>80</b>	<b>430</b>	<b>85</b>	<b>430</b>	<b>100</b>	<b>440</b>	<b>410</b>	<b>2.200</b>	<b>IPW</b>
		Asistensi pengembangan kota	Terlaksananya asistensi pengembangan kota	bulan	0	0	0	12	100	12	110	12	110	12	120	48	440	
		Optimalisasi pokja AMPL	Terlaksananya koordinasi pokja AMPL	bulan	12	12	200	12	200	12	220	12	220	12	220	60	1.060	
		Penyusunan master plan infrastruktur perkotaan	Dokumen master plan infrastruktur perkotaan	dokumen	0	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300	
		Koordinasi pengembangan kota dan penanganan perumahan	Terlaksananya koordinasi pengembangan kota dan penanganan perumahan	Bulan	0	0	0	12	100	12	100	12	100	12	100	48	400	

			<b>Program pengembangan wilayah perbatasan</b>	<b>Persentase capaian kinerja bidang/urusan Prasarana Wilayah</b>	<b>%</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>65</b>	<b>400</b>	<b>70</b>	<b>400</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	<b>345</b>	<b>1.750</b>	<b>IPW</b>	
			Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Dokumen perencanaan pengembangan perbatasan	dokumen	-	1	150	2	400	2	400	2	400	2	400	9	1.750		
<b>Bidang Litbang dan PP</b>																				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kelitbangan	Meningkatnya jumlah penelitian & inovasi daerah	1. Presentase peningkatan jumlah penelitian dan inovasi yang terjaring					<b>0%</b>		<b>6%</b>		<b>6%</b>		<b>5%</b>		<b>5%</b>					
		2. Presentase hasil inovasi, penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti																		
		<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>prosentase data base dan informasi yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>150</b>	<b>95%</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>	<b>985</b>			Bidang Litbang dan PP
		Pendamping penyusunan profil daerah	jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah	DOK	2	2	25	2	30	2	35	2	40	2	50		180			

		<b>Program Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>prosentase Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ditindak lanjuti</b>	%	0	150	180	210	220	225	985							
		Kerjasama perguruan tinggi	jumlah pelaksanaan KKN		6	8	150	9	180	10	210	11	220	12	225	50	985	
		<b>Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Kegiatan KeLitbangan yang dimanfaatkan Stakeholder yang dijadikan</b>	%		175	230	190	205	230	1030	Bidang Litbang dan PP						
		Pembinaan dan pengembangan jaringan kelitbangan	Jumlah Dokumen RIK	paket	-	1	50	0	0	0	0	0	0	0	1	50		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan Kelitbangan	paket	-	2	50	3	60	3	60	3	70	4	80	15	320	
		Pengembangan sistem inovasi daerah	Jumlah Dokumen Roadmap Sistim Inovasi Daerah	paket	-	1	20	0	0	0	0	0	0	0	1	20		
			Jumlah terfasiltasinya Pemenang Lomba Krenova	orang	2	3	10	4	15	4	20	4	20	5	20	20	85	
		Tersusunnya Riset Unggulan	Terbentuknya Dewan Riset Daerah	dok	-	1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	1	50	

			Daerah	Jumlah Riset Unggulan Daerah yang dilaksanakan	unit	-	2	20	3	30	4	40	4	40	5	50	18	180	
				Fasilitasi Dewan Riset Daerah	keg	-	2	10	2	10	3	15	3	20	4	25	14	80	
			Penyusunan Kajian Pembangunan Daerah	Tersusunnya Aplikasi Data Base Kelitbangan	paket	-	0	0	1	50	0	20	0	20	0	20	1	110	
				Tersusunnya Aplikasi Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian	paket	-	0	0	1	50	0	20	0	20	0	20	1	110	
				Jumlah Rekomendasi Penelitian	unit	300	400	5	450	5	500	5	550	5	600	5	2500	25	
<b>Sekretariat</b>																			
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Baperlitbang</b>	<b>Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor/ Nilai IKM</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase Tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.138</b>	<b>100</b>	<b>1.178</b>	<b>100</b>	<b>1.215</b>	<b>100</b>	<b>1.253</b>	<b>100</b>	<b>1.290</b>	<b>100</b>	<b>6.073</b>	<b>Sekretariat</b>
			penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya pembayaran listrik, air, internet dan telepon	Bulan	12	12	150	12	155	12	160	12	165	12	170	12	800	
			penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya kebutuhan pembayaran pengelola APBD SKPD	Bulan	12	12	80	12	85	12	90	12	95	12	100	12	450	

		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	50	12	53	12	55	12	58	12	60	12	275	
		penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor dan terfalisasinya perjalanan dinas	Bulan	12	12	600	12	610	12	620	12	630	12	640	12	3.100	
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga pendukung operasional kantor/THL)	terpenuhinya gaji PTT dan THL	Bulan	12	12	258	12	275	12	290	12	305	12	320	12	1.448	
		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>625</b>	<b>100</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>675</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>725</b>	<b>100</b>	<b>3.375</b>	<b>Sekretariat</b>
		pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Paket	1	1	225	1	230	1	235	1	240	1	245	1	1.175	
		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya kondisi gedung kantor	Bulan	12	12	200	12	210	12	220	12	230	12	240	12	1.100	
		pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	200	12	210	12	220	12	230	12	240	12	1.100	

			<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase aparatur perencanaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	%	100	100	40	100	45	100	50	100	55	100	160	100	350	Sekretariat
			Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparatur baperlitbang yang mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan teknis	Orang		5	40	5	45	5	50	5	55	5	160	25	350	
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase keselarasan antar dokumen internal Baperlitbang</b>	%	70	75	50	100	60	100	70	100	80	100	90	100	350	Sekretariat
			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya LKjIP, PK, RKT, POK, RKA, RKO, Renja, DPA, DPPA, LRA, Neraca dan CeLK Tersusunnya Dokumen Renstra, LKPJ	Dok	13	13	50	13	70	13	70	13	75	14	75	14	340	

			<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Persentase capaian Aksi PPK</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>85</b>	<b>70</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>350</b>	<b>Sekretariat</b>
			Rencana Aksi Daerah (AD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya laporan pelaksanaan dokumen Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	dok	4	4	50	4	60	4	70	4	80	4	90	20	350	

KEPALA BAPERLITBANG  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**MULYANTO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590319 198607 1 003



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPJMD dan Renstra Baperlitbang tahun 2017-2022.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2016	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2	Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan	0	2 dok	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	9 dok
3	Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah	0	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	4 dok

	strategis dan cepat tumbuh							
4	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	2 dok	3 dok	3 dok	4 Kegiatan			6 dok 4 keg
5	Meningkatnya kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Banjarnegara	48 OPD	24 OPD	20 OPD	24 OPD	20 OPD	24 OPD	112 OPD
6	Kesesuaian program dalam RKPd yang ada di dalam RPJMD	39%	>90 %	>90 %	>90%	>90 %	>90 %	
7	Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPd	68%	>90 %	>90 %	>90%	>90 %	>90 %	>90%
8	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15 dok
9	terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintah, kesejahteraan dan sosial	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
10	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	10 dok
11	terkoordinasi dan terfasilitasinya prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 keg

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Baperlitbang tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Baperlitbang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Baperlitbang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Baperlitbang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Baperlitbang wajib berpedoman pada Renstra Baperlitbang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Baperlitbang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Baperlitbang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang tahun 2017-2022 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera ”dapat tercapai.